



Justice Update

Tanggal: 1st Maret – 7th Maret 2004

Setelah membuat rencana baru, JSMP memutuskan strukture baru untuk laporan mingguan. Sekarang informasi akan diberi sebagai Update dan mengirim kepada sejumlah aktor pengadilan, masyarakat sipil dan media massa.

Silakan mengirim komentar kepada Alison@jsmp.minihub.org

Pengadilan Distrik Dili

Terdapat 7 kasus perdata dan 5 kasus pidana yang telah terjadwal dan disidangkan di pengadilan distrik Dili. Dari Semua kasus tersebut hanya empat yang disidangkan. Ada dua kasus perdata yang sangat menarik.

Gugatan **Carascalao vs Pemerintah Pemerintah** (c.q Land & Property) di Pengadilan Distrik Dili telah berlangsung tanggal 5 bulan February lalu. Dalam perkara tersebut, Carascalao diwakili oleh pengacaranya berjumlah sebelas orang yang langsung membacakan gugatannya pada sidang hari pertama. Sedangkan pihak Pemerintah diwakili oleh dua orang masing-masing seorang Jaksa Distrik Dili dan seorang Pengacara dari Kantor Public Defender.

Sidang kedua yang berlangsung pada 2 Maret diagendakan bagi pihak Tergugat untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) terhadap gugatan Penggugat. Acara sidang dengan pembacaan eksepsi tidak jadi dibacakan karena pihak Penggugat mempersoalkan status/kedudukan salah seorang Pengacara Tergugat yang menurut pihak Penggugat semula bersama-sama dengan Pengacara Penggugat turut mendiskusikan dan bahkan mengerjakan draft gugatan.

Majelis Hakim sempat meng-skors sidang selama kurang lebih sepuluh menit dan Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pengacara yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan syarat formalitas yang berlaku tentang perihal pemberian kuasa. JSMP berpendapat bahwa, hanya kalau tuntutan itu benar, kasus Pengacara Tergugat yang diangkat pihak Penggugat dalam persidangan mungkin tidak bertentangan dengan syarat pengajuan dan pemberian kuasa sebagaimana disimpulkan Majelis Hakim, tetapi masalah ini erat kaitan dengan berperilaku seorang pengacara dalam praktek penanganan kasus. Sehingga kasus tersebut mungkin dapat dirujuk pada aturan tentang kode etik beracara yang berlaku. Persoalannya adalah, sistim hukum Timor Leste belum memiliki kode etik

dan organisasi pengacara independen untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut perihal tuduhan malpraktek pengacara sehingga, kasus ini mengingatkan pentingnya kode etik dan organisasi pengacara independen dalam sebuah sistim peradilan.

Dalam **sebuah kasus perdata yang lain** Hakim telah menunda kasus tersebut karena seorang tergugat tidak didampingi oleh Pengacara atau kuasa hukum dalam persidangan. Hakim meminta kepada tergugat untuk mengklarifikasi apakah pengacaranya telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya, dan jika memang demikian, maka tergugat harus mencari pengacara lain. Hakim menjelaskan kepada tergugat bahwa meskipun hal itu tidak diharuskan, tetapi barangkali tidak akan diuntungkan jika tergugat tidak didampingi oleh seorang pengacara. Kasus tersebut ditunda selama satu minggu. JSMP mengomentari terhadap dua hal dimana hakim menjelaskan opsi-opsi kepada tergugat untuk mengenal pilihan dimana membutuhkan kuasa hukum untuk mencoba membela persamaan hak antara kedua belah pihak.

Pengadilan distrik Dili tidak dapat melaksanakan persidangan sebagaimana biasa pada hari Jumat tersebut karena seluruh aktor pengadilan sedang menghadiri dialog nasional tentang Sistem Peradilan. Ada empat kasus yang dijadwalkan pada hari Jumat. Tiga kasus pidana dan satu kasus perdata, walaupun demikian, hanya ada satu kasus perdata yang secara formal telah ditunda hingga Jumat yang akan datang. JSMP mendukung kehadiran aktor pengadilan di dialogue nasional tetapi JSMP memandang lebih baik kalau kasus ditunda sebelum hari persidangan tersebut.

Bagian terakhir dari perkembangan pengadilan distrik terkini menyediakan juga komentar-komentar mengenai dialog.

Pengadilan Khusus untuk Kejahatan Berat

Pada tanggal 3-5 Maret 2004 pengadilan khusus untuk kejahatan berat melakukan sidang kasus terhadap mantan komandan Milisi sakunar Lourenco Takaqui di Passabe Oecussi yang terjadi pada tahun 1999. Persidangan yang dilakukan di pos perbatasan polisi (BPU) tersebut disaksikan oleh puluhan masyarakat dibalik pagar pos.

JSMP menyarankan bahwa pengadilan kejahatan berat untuk melakukan kunjungan ke Tempat Kejadian Perkara adalah sesuatu hal yang positif, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti terdakwa tidak diikutsertakan dalam kunjungan ke Tempat Kejadian Perkara dan juga terdakwa tetap dalam keadaan diborgol pada saat hari pertama sidang. Satu aspek positif yaitu reaksi positif dari masyarakat Passabe dengan hadirnya actor pengadilan internasional. Masyarakat merasa bahwa mereka mengikuti dengan baik situasi tersebut dan merasa senang bahwa

proses-proses hukum internasional dilaksanakan. Kasus ini akan dilanjutkan di Dili dalam beberapa minggu yang akan datang.

Pengadilan Tinggi

Sejak tahun 2001 sampai 2004 pengadilan tinggi menerima 142 kasus. Dari kasus 142 tersebut, 56 kasus menunggu untuk disidangkan dan 86 kasus sudah diputuskan

Dalam tahun ini, pengadilan tinggi memulai sidangnya, karena kurang lebih selama dalam satu bulan (Januari, Februari, Maret) pengadilan tinggi melakukan persidangan hanya tiga kali. Sesuai dengan agenda pengadilan tinggi mengatakan dalam bulan maret ini ingin melakukan tiga persidangan pada tanggal 10, 11 dan 17.

JSMP mengharapkan bahwa bulan depan pengadilan tinggi bisa melakukan persidangan secara cepat seperti pada bulan Juli sampai Desember 2003 pengadilan tinggi melakukan kurang lebih 10 kasus. Kalau pengadilan melakukan persidangan banyak setiap bulan akan menjamin bahwa kasus diselesaikan secara cepat dan menjamin hak-hak tersangka untuk melakukan banding sesuai dengan konstitusi Republik Demokratik Timor Leste.

Dialog Nasional

Pada tanggal 5,6,8 Maret, dialog nasional ketiga dengan tema sistem judicial dilaksanakan di Dili. Dalam dialog tersebut dihadiri oleh para hakim, pejabat tinggi pemerintahan, aktor pengadilan dan masyarakat umum. Maksud dari diskusi tersebut untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh sistem judicial di Timor Leste dewasa ini dan menentukan langkah yang lebih kuat dan memperbaiki akses ke keadilan.

JSMP mendukung inisiatif ini dan pandangan-pandangan itu seperti sebuah jalan yang menguntungkan untuk berkonsultasi dengan individu-individu dan organisasi-organisasi dalam faktor itu mereka tergantung pentingnya untuk fungsi yang efektif dari sistem judicial. Pada umumnya, forum menanggapi dengan baik dan mengangkat isu-isu yang signifikan.

Satu dari isu yang timbul dalam dialog adalah konsultasi distrik yang telah direncanakan untuk "otoritas distrik" mempunyai kekuatan untuk memutuskan kasus perdata dan kasus-kasus kriminal ringan. Maksudnya adalah badan ini akan mengajukan aspek-aspek hukum adat dan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tingkat distrik. JSMP percaya bahwa ada persoalan-persoalan yang signifikan yang perlu didiskusikan dalam kaitan dengan usul diatas. Sebagai contoh, apa kompetensi khusus dari badan tersebut? siapa yang memimpin sidang? dan apa yang menjadi kewenangan otoritas lokal untuk menangkap dan menahan? memberikan suatu pendirian formal dari sebuah lokal otoritas sistem yang hasilnya akan signifikan secara struktur dari keadilan di distrik, JSMP percaya itu adalah usulan itu penting untuk diperjelas lebih lanjut, itu bertentangan dengan analisa standar internasional dan kemudian usulan itu didiskusikan secara mendalam.

Isu yang diangkat oleh president pengadilan tinggi, Claudio Ximenes, dan menteri kehakiman, Domingos Sarmiento, tentang kekurangan kapasitas dari aktor pengadilan, termasuk hakim-hakim, jaksa dan pengacara. Dalam jawabannya, pentingnya training dan mentor juga diangkat oleh dua hakim dari pengadilan distrik dan juga dari NGO, yang mengatakan bahwa menolak menerima program training dari organisasi-organisasi independen, seperti organisasi internasional pembangunan hukum dan The Asia foundation, yang telah mempunyai keterbatasan profesional pembangunan dari aktor pengadilan. JSMP percaya bahwa semua aktor pengadilan dalam sektor keadilan harus mendapatkan penuh dukungan dan setiap usaha pasti menyimpan koordinasi antara menteri kehakiman dan NGO jadi, hakim, jaksa, pengacara menerima training yang cukup.

Topik yang lain yang paling didiskusikan selama dialog adalah administrasi keuangan dari pengadilan, kantor kejaksaan dan kantor pengacara umum, banyak partisipan, termasuk president pengadilan tinggi, jaksa agung dan koordinator pengacara umum, memperhatikan problem-problem dewasa ini dari institusi yang secara langsung dipertahankan dari administrasi keuangan menteri kehakiman. Mereka mengklaim bahwa institusi-institusi mereka dewasa ini tidak ada budget yang dialokasikan ke mereka, kenyataan yang dihadapi mereka sehari-hari adalah satu yang diperlukan dalam permohonan ke menteri kehakiman dalam memerintahkan alokasi dana ke institusi mereka mereka.

JSMP khawatir bahwa direksi dari menteri kehakiman (direksi no 3/2003- oktober 2003) menyediakan bahwa administrasi keuangan dari pengadilan, kantor kejaksaan, kantor pengacara umum adalah ditangan direksi nasional untuk administrasi, keuangan, dan pelayanan staf dari menteri kehakiman sampai institusi mereka mempunyai kapasitas untuk mengurus dana secara independen. Bagaimanapun, direksi ini tentu menyediakan banyak ukuran dan bagaimanapun kapasitas ini harus dibangun. Dalam perintah untuk menjamin independent judicial dan jalannya sistem judicial secara efektif di Timor Leste, JSMP mengharapkan bahwa diskusi yang dilakukan selama dialog nasional akan membawa hasil dalam perubahan dan ukuran yang dapat dipercaya dalam waktu dekat.